

Bahan Ajar:

Pembangunan Berbasis Masyarakat

M. Taufiq Rahman

A. Konsepsi Pembangunan Berbasis Masyarakat

Pembangunan menurut pengertian umum adalah suatu upaya terencana untuk merubah wilayah dan masyarakat menuju keadaan lebih baik (Boserup, E., 2017). Dari tinjauan Ilmu sosial, pembangunan diartikan perubahan masyarakat yang berlangsung secara terus menerus sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara optimal (Rahman, 2011). Strategi Pembangunan berkembang dari masa ke masa secara dinamis sesuai dengan konteks peradaban. Paradigma Pembangunan yang menekankan pada Pembangunan ekonomi mulai ditinggalkan karena tidak dapat menjawab masalah sosial seperti kemiskinan, kejahatan, kesenjangan, dan keterbelakangan (Giddens, A., 2013). Paradigma pembangunan kemudian bergeser ke arah pendekatan masyarakat yang sebelumnya sebagai obyek pembangunan, sekarang menjadi subyek Pembangunan. Paradigma baru ini berbasis komunitas dengan memberikan tempat utama bagi prakarsa, keanekaragaman lokal, dan kearifan local (Cochrane, A., 2010).

Keunggulan pembangunan berbasis masyarakat mengarahkan perkembangan pada:

1. Kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam proses pembangunan;
2. Konsep teknologi tepat guna, *indigenous technology*, *indigenous knowledge* dan *indigenous institutions* sebagai akibat kegagalan konsep transfer teknologi;
3. Tuntunan masyarakat dunia tentang hak asasi, keadilan, dan kepastian hukum dalam proses pembangunan;

4. Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yang merupakan suatu alternatif paradigma pembangunan baru;
5. Lembaga swadaya masyarakat;
6. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendekatan pengembangan masyarakat dalam praksis pembangunan (Merry, S. E., & Conley, J. M., 2011).

Pembangunan berbasis masyarakat menciptakan masyarakat berdaya dan berbudaya. Keberdayaan memungkinkan suatu masyarakat bertahan dan mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan. Sebagian besar masyarakat berdaya adalah individunya memiliki kesehatan fisik, mental, terdidik, kuat dan berbudaya. Membudayakan masyarakat adalah meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu lepas dari kemiskinan, kebodohan, ketidaksehatan, dan ketertinggalan. Untuk mendorong masyarakat berdaya dengan cara menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Pengembangan daya tersebut dilakukan dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat. Penguatan tersebut meliputi penyediaan berbagai masukan serta membuka akses pada berbagai peluang yang ada. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dengan inti pemberdayaan adalah transformasi manajemen komunitas menuju kesejahteraan bersama (Seyfang, G., & Haxeltine, A., 2012). Pemberdayaan ini merupakan sarana ampuh untuk keluar dari kemiskinan, kebodohan dan ketertinggalan menuju kesejahteraan bersama.

Pembangunan tanpa memperhatikan karakteristik dan kebutuhan lokal akan banyak membuang sumberdaya secara sia-sia. Karakteristik geografi seperti lokasi dekat laut, pinggir sungai, pinggir hutan, pedalaman sangat berpengaruh terhadap model pembangunan yang diimplementasikan. Faktor lain yang perlu mendapat perhatian utama adalah kearifan lokal yang memerlukan inventarisasi, reorientasi, dan reinterpretasi maknanya. Model pemberdayaan yang sering dan mudah dilakukan yaitu dengan menggeneralisasi pemberdayaan masyarakat secara nasional. Pendekatan pemberdayaan secara nasional dilakukan

dengan asumsi bahwa kebutuhan masyarakat sama untuk seluruh daerah atau sama dengan kebutuhan penyusun kebijakan. Inilah penyebab utama pembangunan yang tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat (penghamburan sumber daya). Akhirnya dalam beberapa kasus, masyarakat tidak menghiraukan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Selain pembangunan yang telah dilaksanakan tidak bermanfaat, generalisasi seperti ini mereduksi kebudayaan lokal yang dapat menjadi modal sosial pembangunan (Storper, M., 2005). Oleh karena itu, pemberdayaan yang disusun secara nasional patut direvaluasi dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan wilayahnya masing-masing.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh masyarakat dalam pemberdayaan adalah pertama, memilih prioritas, menyusun alternatif–alternatif pelaksanaan, mengevaluasi dan melakukan inovasi. Kedua, dapat membuka akses kepada sumber daya pendukung lainnya, termasuk membuka jaringan kepada komunitas lainnya. Ketiga, kebersamaan dalam pemanfaatan dan kepemilikan alat-alat produksi. Terakhir, memperkuat masyarakat untuk ikut secara langsung dalam menentukan arah kebijakan yang kondusif bagi perkembangan mereka (Doppelt, B., 2017). Pembangunan dengan model seperti ini menjadikan masyarakat subyek pembangunan (bukan obyek pembangunan), sehingga masyarakat sudah mempertimbangkan kondisi dan budaya lokalnya masing-masing sebelum menentukan alternatif-alternatif pilihan.

Keberhasilan pemberdayaan bukan hanya secara administrasi sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, akan tetapi yang lebih substantif yaitu apakah kegiatan tersebut dapat bertahan lama setelah selesai proyek (kebanyakan selesai proyek selesai pula kegiatan). Kegiatan dapat bertahan lama apabila pembangunan tersebut sesuai dengan kebutuhan, bermanfaat dan tidak bertentangan dengan sistem nilai masyarakat. Tugas pemerintah dan lembaga adalah mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran masyarakat untuk dapat menolong dirinya sendiri dalam mewujudkan kemandirian (Nam, T., & Pardo, T. A., 2011). Pemberdayaan dikatakan sangat

berhasil apabila kegiatan tersebut dapat berkembang dan dicontoh oleh masyarakat lainnya.

B. Faktor Pendukung Pembangunan Berbasis Masyarakat

Pembangunan yang berbasis masyarakat menempatkan posisi masyarakat sebagai aktor/manajer pembangunan dan hanya sedikit melibatkan intervensi pihak lain seperti LSM maupun pemerintah (Hart, R. A., 2013). Sumbangan pembangunan berbasis masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan diantaranya:

1. Meningkatkan kapasitas lokal, program pelatihan/transfer teknologi,
2. Program pemeliharaan fasilitas umum termasuk pemeliharaan prasarana jaringan air minum perdesaan, dan
3. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi kepada pemerintah mengenai program-program apa yang dibutuhkan dan bersifat krusial bagi masyarakat lokal (Nam, T., & Pardo, T. A., 2011).

Karakteristik prasarana merupakan kondisi dan kinerja prasarana untuk dapat mendukung aktifitas masyarakat. Prasarana yang secara teknis sederhana misalnya pasca pembangunan jaringan perpipaan air minum perdesaan yang dapat dikelola dan dibiayai oleh komunitas masyarakat sendiri. Masyarakat akan berperan serta untuk memelihara dan mengelola prasarana yang telah dibangun bila mereka mendapat manfaat langsung dari prasarana tersebut atau berhubungan dengan kinerja prasarana (Benedict, M. A., & McMahon, E. T., 2012). Prasarana lingkungan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat akan memberikan pengaruh positif pada manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Hal ini dapat merangsang tumbuhnya rasa ikut memiliki yang pada akhirnya akan tumbuh kesadaran untuk memelihara, mengelola dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan berupa perbaikan dan pemeliharaan (Nam, T., & Pardo, T. A., 2011).

Chougill (Khansari, N., Mostashari, A., & Mansouri, M., 2014) memberikan pendekatan berupa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan prasarana, yang disarikan dari kajian teoretis dan pengalaman beberapa negara. Dalam pendekatannya adanya keterkaitan antara peran atau intervensi pemerintah, khususnya pemerintah lokal dengan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan prasarana. Hal ini menguatkan konsep keberlanjutan yang tidak bisa melepaskan pendekatan partisipasi masyarakat di dalamnya dengan bantuan pemerintah dan pihak ketiga (fasilitator).

Adapun prinsip-prinsip yang diutarakan oleh Chougill (Khansari, N., Mostashari, A., & Mansouri, M., 2014) ada sepuluh yaitu:

1. Harus disadari bahwa dalam pengelolaan prasarana terdapat dua sektor yakni formal dan non formal,
2. Bahwa dalam pengelolaan prasarana memerlukan teknologi yang mampu dioperasionalkan oleh pengelolanya sendiri (masyarakat) dan menggunakan prinsip *cost recovery*,
3. Status tanah menjadi masalah yang harus bisa diselesaikan dengan bijak supaya tidak memberikan dampak yang merugikan terhadap sistem perkotaan,
4. Prasarana informal harus didesain dan dibangun dengan bantuan teknis dari luar sehingga dapat disatukan dalam sistem perkotaan, yang harus disadari memerlukan waktu yang lama,
5. Pengelolaan prasarana dan sarana harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pembangunan, operasional serta pemeliharaan. Keterlibatan pemerintah dan pihak ketiga (fasilitator) hanya sebagai *supporter* bukan lagi sebagai pemilik dan manager dari suatu kegiatan pembangunan,
6. Teknologi yang dipilih harus mampu dioperasionalkan dan dipelihara sendiri oleh masyarakat,

7. Prasarana harus mampu melayani pengguna dengan tingkatan pendapatan yang rendah (miskin),
8. Prasarana yang dibangun harus diterima secara sosial oleh masyarakat lokal/setempat,
9. Peningkatan peran pemerintah sebagai *enabler* dan fasilitator dalam pembangunan prasarana diperlukan untuk mencapai cakupan layanan prasarana yang lebih luas, dan
10. Organisasi non pemerintah (LSM) dapat lebih berperan/terlibat dalam membantu pemberdayaan masyarakat sehingga implementasi pembangunan berbasis partisipasi lebih diterima sebagai pendekatan pembangunan terkini.

Keberhasilan pelaksanaan program pembangunan, khususnya pembangunan prasarana dasar dengan pendekatan partisipatif ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor yang utama tentu saja adalah faktor komponen masyarakat sendiri, faktor lain yang berpengaruh adalah keterlibatan pihak ketiga sebagai fasilitator (pendamping). Untuk itu diperlukan peran fasilitator dalam upaya pemberdayaan sehingga masyarakat mampu merumuskan masalah, membuat rencana, serta mengorganisasikan komunitasnya untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan kebudayaan dengan mengintegrasikan segenap sumber daya yang dimilikinya. Selain faktor tersebut mekanisme pelaksanaan program juga sangat menentukan keberhasilan dan keberlanjutan dari program pembangunan yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif. Sesuai dengan pengertian pengelolaan oleh masyarakat sebagai bagian siklus pembangunan partisipatif, maka masyarakat harus mampu memberikan pengaruh yang kuat serta mengontrol dalam mekanisme pelaksanaan pembangunan. Untuk itu adanya pilihan teknologi dan tingkat layanan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat menjadi prasyarat utama dalam keberlanjutannya (Vlacheas, P. et.al., 2013). Hal ini bisa diterjemahkan juga sebagai faktor karakteristik program/proyek yang dilaksanakan. Prasarana yang bersifat sederhana dalam hal teknis perencanaan dan

penanganannya serta dalam skala kecil dapat dikembangkan oleh organisasi masyarakat lokal.

Karakteristik prasarana menentukan kondisi dan kinerja prasarana untuk mendukung aktifitas kehidupan masyarakat (Lovell, S. T., & Taylor, J. R., 2013). Masyarakat pada akhirnya akan berperan serta dalam memelihara dan mengelola prasarana yang telah dibangun bila masyarakat tadi mendapat manfaat langsung dari prasarana dimaksud, yang mana dalam hal ini berhubungan dengan kinerjanya. Untuk mengetahui sejauh mana peran partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan bersama yang diinginkan diperlukan suatu tolok ukur/tingkatan efektifitas dari partisipasi itu sendiri.

Efektifitas menurut Drucker (2016) yaitu suatu tingkatan yang sesuai antara keluaran empiris suatu sistem dengan keluaran (*output*) yang diharapkan. Dengan mengetahui tingkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka akan diketahui sejauh mana peran masyarakat dalam melakukan kontrol dan seberapa besar pengaruh intervensi pemerintah dalam pendekatan pembangunan yang dilaksanakan.

C. Faktor Penghambat Pembangunan Berbasis Masyarakat

Kecenderungan pembangunan yang bersifat nasional telah menjadikan salah satu prasyarat utama, yaitu perlunya partisipasi masyarakat. Kemauan pemerintah dalam memahami pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan suatu langkah maju, akan tetapi dalam aplikasi di lapangan masih cukup banyak ditemukan permasalahan maupun hambatan yaitu:

1. Belum dipahaminya makna yang sebenarnya dari konsep partisipasi oleh pihak perencana dan pelaksana pembangunan (Selznick, P., 2011). Definisi partisipasi yang berlaku di kalangan pihak perencana dan pelaksana pembangunan adalah kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh

pemerintah. Kenyataannya para perencana dan pelaksana menggunakan konsep hierarkis dalam menyeleksi proyek pembangunan di perdesaan, sehingga proyek-proyek perdesaan yang berasal dari pemerintah diistilahkan sebagai proyek pembangunan yang dibutuhkan oleh rakyat, sedangkan proyek yang diusulkan masyarakat desa dianggap sebagai keinginan. Karena merupakan suatu kebutuhan maka proyek pemerintah tersebut harus dilaksanakan, sedangkan proyek yang diusulkan oleh masyarakat hanya berupa keinginan yang dengan itu proyek itu pun memperoleh prioritas yang rendah.

2. Reaksi balik yang datang dari masyarakat sebagai akibat dari diberlakukannya pembangunan sebagai ideologi baru (Cantle, T., 2018). Sebagai ideologi maka pembangunan harus diamankan dan dijaga dengan ketat. Persepsi seperti ini mendukung asumsi bahwa subsistem adalah suatu subordinat dari suprasistem dan membuat subsistem menjadi bagian yang benar-benar pasif. Pengamanan yang ketat terhadap pembangunan menimbulkan reaksi balik dari masyarakat yang merugikan usaha membangkitkan kemauan rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Dari kedua hambatan diatas, maka didapatkan kesimpulan yaitu:

- 1) Bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, dan membiayai pembangunan;
- 2) Untuk mengembangkan dan melembagakan partisipasi rakyat dalam pembangunan harus diciptakan suatu perubahan dalam persepsi pemerintah terhadap pembangunan. Pembangunan haruslah dianggap sebagai suatu kewajiban moral dari seluruh bangsa ini, bukan suatu ideologi baru yang harus diamankan; dan
- 3) Untuk membangkitkan partisipasi rakyat dalam pembangunan diperlukan sikap toleransi dari aparat pemerintah terhadap kritik, pikiran alternatif yang muncul dalam masyarakat sebagai akibat dari dinamika pembangunan itu sendiri,

karena kritik dan pikiran alternatif itu sendiri merupakan suatu upaya perbaikan.

D. Pembangunan Berbasis Masyarakat dan Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah salah satu produk terpenting reformasi politik yang berlangsung di Indonesia sejak tahun 1998 yang bermuatan demokratisasi. Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kualitas keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan bagi seluruh unsur bangsa yang beragam dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sedangkan tujuan khusus dari kebijakan otonomi daerah adalah meningkatkan keterlibatan serta partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan maupun implementasinya sehingga terwujud pemerintahan lokal yang bersih, efisien, transparan, responsif, dan akuntabel (Nomor, U. U. R. I., 2014).

Otonomi daerah juga memberikan pendidikan politik pada masyarakat akan urgensi keterlibatan mereka dalam proses pemerintahan lokal yang konstruktif terhadap tegaknya pemerintahan nasional yang kokoh dan *legitimated*. Di samping itu, otonomi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih para pemimpin mereka secara demokratis. Bahkan, otonomi membangun kesalingpercayaan antar masyarakat di satu pihak dan antara masyarakat dengan pemerintah di pihak lain (Halim, A., & Abdullah, S., 2010).

Dengan kata lain semangat yang terkandung dalam otonomi daerah, secara prosedural maupun substansial adalah pengukuhan kembali kedaulatan rakyat (demokratisasi) setelah sekian lama terkubur akibat menguatnya "cengkeraman" negara. Substansi lainnya adalah mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih (*good governance*) di tingkat lokal pada khususnya dan di tingkat nasional pada umumnya. Menyangkut persepsi otonomi daerah, Bung Hatta dalam pidatonya pernah menekankan otonomi daerah sebagai bagian dari kedaulatan rakyat. Namun menurut Bung Hatta, kedaulatan rakyat tidak boleh bertentangan

dengan dasar-dasar yang ditetapkan GBHN (Hutabarat, P. N., Harsasto, P., & Utomo, S., 2015).

Di sinilah maknanya bahwa otonomi daerah harus dilihat sebagai perwujudan hak dan kewajiban bagi masyarakat di daerah untuk mengembangkan dirinya menjadi masyarakat yang mandiri dan terbuka sebagai manifestasi peran serta masyarakat dalam pemerintahan yang demokratis. Otonomi daerah secara konsepsional harus tidak membebani masyarakat, tetapi justru memberikan motivasi, memberdayakan, dan membangkitkan prakarsa serta mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pembangunan sehingga otonomi menumbuhkan kemandirian dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Utama, I. M. A., 2008).

E. Masyarakat sebagai Pusat Pembangunan

Berbicara mengenai pembangunan berbasis masyarakat, maka sebenarnya secara tidak langsung berbicara mengenai pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*). Hal ini dapat terjadi karena kata masyarakat di situ bukanlah hanya sebagai suatu institusi sosial, tetapi juga sebagai manusia yang merupakan individu dalam masyarakat. Tujuan pembangunan sosial menurut pandangan UN-ESCAP (United Nations-The Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) pada dasarnya adalah pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Berdasarkan tujuan tersebut, UN-ESCAP melihat bahwa penekanan dari pembangunan sosial pada dasarnya adalah pembangunan yang berpusat pada manusia, sehingga terlihat kesamaan pola gerak dari pembangunan sosial dan pembangunan yang berpusat pada manusia, yaitu pada upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan menfokuskan pada pemberdayaan dan pembangunan manusia itu sendiri (Paton, J., & Valiente-Riedl, E., 2016).

Secara umum, banyak negara yang melihat *people centered development* berbeda dengan *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan). Menurut

Korten (1987), *people centered development* adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan kemakmuran manusia, meningkatkan keadilan serta berkesinambungan. Pemikiran yang mendominasi paradigma ini adalah pembangunan yang memerhatikan keseimbangan ekologi manusia. Sedangkan menurut World Commission on Environment and Development atau disebut juga Bruntland Commission, 1987, Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Pentingnya pembangunan berpusat pada manusia dan pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan masyarakat adalah karena pada dasarnya peran individu itu sendiri penting dalam suatu komunitas maupun lingkungannya. Peran individu dalam masyarakat terkait pembangunan sosial sangat diperlukan untuk menciptakan tatanan lingkungan dan masyarakat yang lebih baik lagi. Pertumbuhan kesejahteraan masyarakat juga harus sejalan dengan pelestarian lingkungan hidup di sekitarnya.

Mengingat peran individu menentukan dalam komunitas maupun lingkungannya, maka diperlukan pemberdayaan dan partisipasi untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang dituju. Pada intinya pemberdayaan bertujuan untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan masyarakat, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan (Loorbach, D., 2010). Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya. Berbagai pengertian yang ada mengenai pemberdayaan, pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai kemampuannya.

Dalam hal partisipasi, ada banyak hal definisi tentang partisipasi. Oleh karena itu, partisipasi sesungguhnya berasal dari masyarakat dan dikelola oleh

masyarakat itu sendiri, ia adalah tujuan dalam suatu proses demokrasi. Pada intinya, istilah partisipasi sering digunakan dalam tiga bentuk, yaitu:

- 1) Partisipasi sebagai label domestik: agar terlihat lebih cantik sehingga lembaga donor ataupun pemerintah mau membiayai proyek tersebut;
- 2) Partisipasi menggambarkan *coopting practice*: memobilisasi tenaga-tenaga di tingkat lokal dan mengurangi pembiayaan proyek;
- 3) Partisipasi digunakan untuk menggambarkan proses pemberdayaan: memungkinkan masyarakat lokal untuk melakukan analisis masalah mereka, memikirkan cara mengatasinya, percaya diri dalam mengatasi masalah dan dapat mengambil keputusan sendiri tentang alternatif pemecahan masalah mereka (Arora, S., & Romijn, H., 2012).

Dari gambaran mengenai pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, maka terlihat dengan jelas bagaimana pembangunan berbasis masyarakat berupaya memaksimalkan peran individu-individu dalam masyarakat guna mengangkat kehidupan mereka sendiri. Hal ini sangat penting, karena kesejahteraan masyarakat tidak dapat dicapai jika hanya bergantung pada pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah saja, masyarakat juga harus terlibat aktif di dalam usaha pembangunan yang dilakukan.

Dari hal-hal yang telah disampaikan tadi, keunggulan pembangunan berbasis masyarakat adalah adanya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya partisipasi mereka di dalam pembangunan. Kesadaran merupakan kunci utama dari suatu tindakan yang sistematis dan rasional yang dilakukan oleh masyarakat. Setidaknya dari kesadaran ini dapat terbentuk konsep pemikiran masyarakat mengenai hak asasi, terkait keadilan dan kepastian hukum dalam proses pembangunan yang tengah berlangsung (Utama, I. M. A., 2008). Selain itu, kesadaran juga membuat masyarakat memahami karakteristik mereka seperti apa, terkait geografis daerah lingkungan mereka, agar teknologi yang diberdayakan kepada masyarakat menjadi tepat guna. Hasil yang diharapkan selain

kesejahteraan masyarakat yang dituju berhasil, tentunya pelestarian lingkungan ekologi juga terjaga (Lovell, S. T., & Taylor, J. R., 2013).

DAFTAR PUSTAKA

- Arora, S., & Romijn, H. (2012). The empty rhetoric of poverty reduction at the base of the pyramid. *Organization*, 19(4), 481-505.
- Benedict, M. A., & McMahon, E. T. (2012). *Green infrastructure: linking landscapes and communities*. Island Press.
- Boserup, E. (2017). *The conditions of agricultural growth: The economics of agrarian change under population pressure*. Routledge.
- Cantle, T. (2018). *Community cohesion: A new framework for race and diversity*. Springer.
- Cochrane, A. (2010). Alternative approaches to local and regional development. In *Handbook of local and regional development* (pp. 119-128). Routledge.
- Doppelt, B. (2017). *Leading change toward sustainability: A change-management guide for business, government and civil society*. Routledge.
- Drucker, P. (2016). *The effective executive*. Routledge.
- Giddens, A. (2013). *The third way and its critics*. John Wiley & Sons.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2010). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(1), 53-64.
- Hart, R. A. (2013). *Children's participation: The theory and practice of involving young citizens in community development and environmental care*. Routledge.
- Hutabarat, P. N., Harsasto, P., & Utomo, S. (2015). Pemikiran Politik Mohammad Hatta Tentang Demokrasi. *Journal of Politic and Government Studies*, 4(2), 146-160.
- Khansari, N., Mostashari, A., & Mansouri, M. (2014). Impacting sustainable behavior and planning in smart city. *International Journal of Sustainable Land Use and Urban Planning*, 1(2).
- Korten, D. C. (1987). Third generation NGO strategies: A key to people-centered development. *World development*, 15(1), 145-159.
- Loorbach, D. (2010). Transition management for sustainable development: a prescriptive, complexity-based governance framework. *Governance*, 23(1), 161-183.
- Lovell, S. T., & Taylor, J. R. (2013). Supplying urban ecosystem services through multifunctional green infrastructure in the United States. *Landscape ecology*, 28(8), 1447-1463.

- Merry, S. E., & Conley, J. M. (2011). Measuring the world: Indicators, human rights, and global governance. *Current Anthropology*, 52(S3).
- Nam, T., & Pardo, T. A. (2011). Conceptualizing smart city with dimensions of technology, people, and institutions. In *Proceedings of the 12th annual international digital government research conference: digital government innovation in challenging times* (pp. 282-291). ACM.
- Nomor, U. U. R. I. (2014). Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah. 30 September 2014. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*.
- Paton, J., & Valiente-Riedl, E. (2016). Is Globalizing 'development' Ethical? A View from the Pacific. In *Ethical Issues in Poverty Alleviation* (pp. 93-112). Springer, Cham.
- Rahman, M. Taufiq. (2011). *Glosari Teori Sosial*. Bandung: Ibnu Sina Press.
- Selznick, P. (2011). *Leadership in administration: A sociological interpretation*. Quid Pro Books.
- Seyfang, G., & Haxeltine, A. (2012). Growing grassroots innovations: exploring the role of community-based initiatives in governing sustainable energy transitions.
- Storper, M. (2005). Society, community, and economic development. *Studies in comparative international development*, 39(4), 30-57.
- Utama, I. M. A. (2008). *Hukum Lingkungan: Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan*. www.tokobukuonline.com-TBO.
- Vlacheas, P., Giaffreda, R., Stavroulaki, V., Kelaidonis, D., Foteinos, V., Poullos, G., ... & Moessner, K. (2013). Enabling smart cities through a cognitive management framework for the internet of things. *IEEE communications magazine*, 51(6), 102-111.